

penguatan komunikasi lintas sektor, peningkatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi peran masing-masing pemangku kepentingan guna mewujudkan tata kelola pembangunan infrastruktur yang lebih inklusif dan efektif.

Katakunci: *Collaborative governance*, Hexa Helix, Infrastruktur, Jalan Tol Sibanceh, Tata Kelola

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Dalam konteks ini, keberadaan jalan tol menjadi instrumen strategis dalam mempercepat mobilitas barang dan jasa, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan. Salah satu proyek infrastruktur strategis tersebut adalah Jalan Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh), yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam kerangka pengembangan jaringan Jalan Tol Trans-Sumatera. Jalan tol ini tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar wilayah, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan tata ruang wilayah di Aceh. Pembangunan infrastruktur berskala besar seperti Jalan Tol Sibanceh tidak terlepas dari berbagai tantangan kompleks, baik dari sisi teknis, sosial, maupun kelembagaan. Permasalahan seperti pembebasan lahan, resistensi masyarakat, koordinasi antar lembaga, hingga keterlibatan sektor swasta dan masyarakat menjadi isu krusial yang memerlukan pendekatan tata kelola yang lebih inklusif dan kolaboratif. Dalam kondisi demikian, pendekatan tradisional yang bersifat top-down dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas permasalahan pembangunan infrastruktur modern.

Konsep *Collaborative governance* hadir sebagai paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan. *Collaborative governance* menekankan pada pentingnya keterlibatan berbagai aktor, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Pendekatan ini mengedepankan prinsip dialog, partisipasi, konsensus, serta pembagian peran yang jelas antar pemangku kepentingan. Menurut Ansell dan Gash (2008), *Collaborative governance* merupakan proses di mana aktor publik dan non-publik terlibat secara langsung dalam forum kolektif untuk mencapai tujuan bersama melalui konsensus. Penerapan *Collaborative governance* telah banyak digunakan dalam berbagai sektor, termasuk pembangunan infrastruktur. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kolaborasi antar aktor mampu meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur. Misalnya, studi tentang pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat mampu mempercepat perbaikan jalan serta meningkatkan rasa kepemilikan publik terhadap infrastruktur (Handesta, 2025).

Collaborative governance juga terbukti mampu mengatasi berbagai kendala dalam pembangunan infrastruktur, seperti keterbatasan anggaran, konflik kepentingan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Kolaborasi lintas sektor memungkinkan adanya integrasi sumber daya, baik finansial, teknis, maupun sosial, sehingga menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Namun demikian, keberhasilan *Collaborative governance* sangat bergantung pada faktor-faktor seperti kepemimpinan fasilitatif, kepercayaan antar aktor, serta adanya mekanisme komunikasi yang efektif. Seiring dengan perkembangan teori dan praktik tata kelola kolaboratif, muncul konsep pengembangan model kolaborasi yang lebih kompleks, salah satunya adalah model Hexa Helix. Model ini merupakan pengembangan dari konsep Triple Helix yang awalnya hanya melibatkan tiga aktor utama, yaitu pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Dalam model Hexa Helix, aktor yang terlibat diperluas menjadi enam elemen, yaitu pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, media, dan komunitas atau lembaga non-pemerintah. Model ini dianggap lebih relevan dalam menjawab tantangan pembangunan modern yang semakin kompleks dan multidimensional.

Model Hexa Helix memberikan kerangka yang lebih komprehensif dalam menganalisis keterlibatan berbagai aktor dalam proses pembangunan. Keterlibatan media, misalnya, berperan dalam membentuk opini publik serta meningkatkan transparansi informasi, sementara komunitas dan organisasi masyarakat sipil

berperan dalam memastikan partisipasi masyarakat serta mengawasi jalannya pembangunan. Dengan demikian, model ini mampu menciptakan ekosistem kolaborasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Konteks pembangunan Jalan Tol Sibanceh dapat diterapkan dengan model Hexa Helix menjadi sangat relevan mengingat kompleksitas aktor yang terlibat. Proyek ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah sebagai regulator dan fasilitator, sektor swasta sebagai pelaksana proyek, masyarakat sebagai pihak terdampak, akademisi sebagai penyedia kajian ilmiah, media sebagai penyampai informasi, serta komunitas sebagai pengawas sosial. Interaksi antar aktor ini membentuk suatu sistem kolaborasi yang dinamis, yang memerlukan koordinasi dan sinergi yang kuat agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal.

Implementasi *Collaborative governance* dengan pendekatan Hexa Helix tidak selalu berjalan mulus. Berbagai kendala seperti kurangnya koordinasi antar aktor, perbedaan kepentingan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh adanya kesamaan visi, kejelasan peran, serta komitmen bersama antar pemangku kepentingan (Arif, 2025). Aspek kepercayaan (trust) menjadi faktor kunci dalam membangun kolaborasi yang efektif. Tanpa adanya kepercayaan, proses kolaborasi cenderung mengalami hambatan, seperti konflik kepentingan dan rendahnya komitmen antar aktor. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme dialog yang intensif serta kepemimpinan yang mampu memfasilitasi interaksi antar aktor secara konstruktif. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa penerapan *Collaborative governance* dalam pembangunan infrastruktur, khususnya Jalan Tol Sibanceh, merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Pendekatan ini tidak hanya mampu meningkatkan efektivitas pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa proses pembangunan berjalan secara inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait bagaimana model Hexa Helix diimplementasikan secara konkret dalam proyek infrastruktur di Indonesia, khususnya pada proyek jalan tol. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada *Collaborative governance* dalam konteks pelayanan publik atau pembangunan infrastruktur skala lokal, seperti pemeliharaan jalan atau pembangunan desa. Sementara itu, kajian yang secara spesifik mengkaji penerapan *Collaborative governance* dengan model Hexa Helix dalam proyek strategis nasional masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana kolaborasi antar aktor dalam model Hexa Helix diterapkan dalam pembangunan Jalan Tol Sibanceh.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep *Collaborative governance*, khususnya dalam konteks model Hexa Helix, serta memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan infrastruktur. Dengan memahami dinamika kolaborasi antar aktor, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. urgensi penerapan *collaborative governance* dengan pendekatan Hexa Helix dalam pembangunan Jalan Tol Sibanceh juga semakin menguat jika dikaitkan dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Infrastruktur tidak lagi hanya dinilai dari aspek fisik dan ekonomi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, serta keberlanjutan jangka panjang. Dalam hal ini, keterlibatan berbagai aktor melalui model Hexa Helix memungkinkan adanya integrasi perspektif yang lebih luas, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kolaborasi multi-aktor mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih adaptif dan

resilien terhadap perubahan (Sari, 2022). Penerapan collaborative governance dalam proyek Jalan Tol Sibanceh tidak hanya menjadi strategi manajerial, tetapi juga merupakan pendekatan normatif dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep dan implementasi *collaborative governance* dalam pembangunan infrastruktur, khususnya pada Jalan Tol Sibanceh, melalui analisis berbagai sumber literatur yang relevan. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal akademik, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan topik penelitian. Menurut Zed (2020), penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian tanpa melakukan observasi lapangan secara langsung. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada eksplorasi konseptual dan analisis teoritis terkait *collaborative governance* dan model Hexa Helix dalam konteks pembangunan infrastruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemerintah (*Government*)

Implementasi pembangunan Jalan Tol Sibanceh, pemerintah berperan sebagai aktor pengendali utama (*central orchestrator*) yang menentukan arah, struktur, dan mekanisme kolaborasi. Secara konkret, peran ini terlihat dalam penetapan proyek sebagai PSN, yang kemudian menjadi dasar hukum bagi percepatan pembangunan, termasuk dalam proses pembebasan lahan dan percepatan perizinan.

Pada tahap implementasi, pemerintah tidak hanya mengeluarkan kebijakan, tetapi secara aktif membentuk forum koordinasi lintas aktor, seperti koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Dalam praktiknya, pemerintah daerah khususnya di wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh berfungsi sebagai mediator langsung dalam konflik lahan, dengan melakukan negosiasi antara masyarakat pemilik tanah dan pelaksana proyek. Ini merupakan bentuk nyata *collaborative governance*, di mana pemerintah tidak bekerja sendiri, tetapi bergantung pada interaksi dengan aktor lain (Iskandar, 2022).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peran pemerintah masih sangat dominan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, dalam penentuan trase jalan tol dan nilai ganti rugi lahan, keputusan tetap berada pada otoritas pemerintah dan tim appraisal, sementara masyarakat hanya dilibatkan pada tahap sosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjadi masih bersifat “*managed collaboration*”, bukan *shared decision making* (Ramadhan, 2023).

Ditemukan bahwa beberapa koordinasi antar lembaga pemerintah belum sepenuhnya optimal. Terdapat beberapa kasus keterlambatan proyek yang disebabkan oleh kurangnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal administrasi lahan dan perizinan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah berperan sebagai pengendali kolaborasi, kapasitas kelembagaan dalam mengelola kompleksitas aktor masih menjadi tantangan (Prasetyo, 2024).

2. Publik/Masyarakat

Implementasi peran masyarakat terlihat jelas pada fase pembebasan lahan, di mana masyarakat terlibat dalam:

- proses musyawarah penetapan ganti rugi,
- penyampaian keberatan terhadap nilai kompensasi,

- hingga aksi penolakan di beberapa titik proyek.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berperan sebagai aktor negosiatif, bukan sekadar objek pembangunan (Fadli, 2024).

Namun, pola keterlibatan masyarakat cenderung reaktif, bukan partisipatif sejak awal. Artinya, masyarakat baru terlibat ketika proyek sudah berjalan, bukan pada tahap perencanaan. Akibatnya, muncul resistensi karena masyarakat merasa tidak memiliki ruang dalam menentukan arah pembangunan. Ini terlihat dari konflik sosial yang terjadi akibat ketidaksepakatan harga lahan.

Ketika pemerintah melakukan pendekatan dialogis melalui musyawarah desa dan sosialisasi langsung, tingkat konflik menurun. Ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, keberhasilan collaborative governance sangat bergantung pada intensitas interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat (Yusuf, 2022). Keterbatasan akses informasi dan rendahnya kapasitas masyarakat dalam memahami kebijakan menjadi hambatan utama dalam partisipasi yang efektif. Banyak masyarakat yang tidak memahami prosedur hukum maupun mekanisme appraisal, sehingga posisi tawar mereka menjadi lemah (Hidayat, 2023).

3. Sektor Swasta

Sektor swasta berperan sebagai aktor teknis utama yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konstruksi, manajemen proyek, serta efisiensi operasional.

Implementasi peran ini terlihat pada:

- pengerjaan fisik jalan tol,
- penggunaan teknologi konstruksi,
- pengelolaan waktu dan biaya proyek.

Sektor swasta menjadi pihak yang menerjemahkan kebijakan pemerintah ke dalam bentuk nyata di lapangan. Dalam hal ini, collaborative governance terjadi melalui hubungan kontraktual dan koordinatif antara pemerintah dan badan usaha (Hidayatullah, 2023).

Namun, penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara efisiensi proyek dan kepentingan sosial. Misalnya, dalam beberapa kasus, percepatan proyek oleh pihak swasta berbenturan dengan proses negosiasi lahan yang belum selesai. Hal ini menunjukkan bahwa sektor swasta cenderung berorientasi pada target proyek, bukan pada dinamika sosial. Selain itu, interaksi sektor swasta dengan masyarakat relatif terbatas dan lebih banyak difasilitasi oleh pemerintah. Artinya, sektor swasta tidak berinteraksi langsung dalam kerangka kolaborasi sosial, melainkan melalui pemerintah sebagai perantara.

Implementasi peran ini terlihat dalam aktivitas pembangunan fisik jalan tol, mulai dari pembukaan lahan, pembangunan struktur jalan, hingga penyelesaian infrastruktur pendukung. Orientasi efisiensi yang dimiliki sektor swasta seringkali berbenturan dengan dinamika sosial di lapangan. Ketika proses pembebasan lahan belum selesai, sektor swasta tetap didorong untuk memenuhi target pembangunan, sehingga menimbulkan tekanan terhadap pemerintah untuk mempercepat penyelesaian konflik. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara logika ekonomi dan logika sosial dalam kolaborasi (Nugroho, 2022).

4. Akademisi

Peran akademisi umumnya muncul dalam bentuk:

- penyusunan studi kelayakan,
- analisis dampak lingkungan (AMDAL),
- kajian teknis awal proyek.

Namun, setelah tahap perencanaan selesai, keterlibatan akademisi cenderung menurun dan tidak berlanjut pada tahap implementasi maupun evaluasi (Rahmi, 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, akademisi hanya berperan sebagai knowledge supplier, bukan sebagai mitra kolaboratif yang aktif. Padahal dalam model Hexa Helix, akademisi seharusnya berperan dalam:

- monitoring kebijakan,
- evaluasi dampak sosial,
- serta penguatan kapasitas masyarakat.

Minimnya integrasi ini menyebabkan kebijakan yang diambil kurang berbasis pada kajian berkelanjutan, terutama dalam menangani konflik sosial.

Dengan demikian, implementasi peran akademisi dalam Hexa Helix di Sibanceh masih bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan kurangnya evaluasi berbasis ilmiah terhadap dinamika sosial yang terjadi selama pembangunan. Misalnya, konflik pembebasan lahan tidak dianalisis secara mendalam dari perspektif sosial-budaya, sehingga solusi yang diambil cenderung administratif. Kurangnya komunikasi antara akademisi dan pembuat kebijakan menyebabkan hasil penelitian tidak dimanfaatkan secara optimal. Perbedaan bahasa teknis dan praktis menjadi hambatan dalam integrasi pengetahuan ke dalam kebijakan (Lestari, 2023).

5. Media

Implementasi peran media terlihat melalui:

- pemberitaan progres pembangunan,
- publikasi konflik lahan,
- penyampaian kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Media menjadi saluran utama yang menghubungkan informasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus membentuk opini publik (Nasution, 2022). Pemberitaan media mengenai konflik lahan meningkatkan tekanan terhadap pemerintah untuk mempercepat penyelesaian masalah. Hal ini menunjukkan bahwa media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang mempengaruhi dinamika kebijakan, media tidak terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Perannya lebih bersifat tidak langsung, yaitu mempengaruhi kebijakan melalui opini publik.

6. Regulation (Law)

Regulasi dalam pembangunan Jalan Tol Sibanceh berfungsi sebagai kerangka formal yang mengatur interaksi antar aktor. Implementasi regulasi terlihat dalam penggunaan aturan pengadaan tanah, KPBU, serta kebijakan percepatan PSN. Regulasi memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk melakukan intervensi, termasuk dalam pembebasan lahan. Namun, dalam praktiknya, regulasi juga menjadi sumber konflik, terutama ketika tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Misalnya, perbedaan antara nilai ekspektasi masyarakat menjadi penyebab utama penolakan (Maulana, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa regulasi belum sepenuhnya adaptif terhadap konteks lokal, namun didalam collaborative governance, regulasi seharusnya berfungsi tidak hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai alat negosiasi yang fleksibel.

Implementasi regulasi terlihat dalam:

- penggunaan UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum,
- regulasi KPBU,
- serta aturan percepatan PSN.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai *Penerapan Collaborative Governance dalam Studi Kasus Jalan Tol Sibanceh dengan Model Hexa Helix*, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur strategis tersebut telah melibatkan berbagai aktor lintas sektor yang secara konseptual mencerminkan pendekatan Hexa Helix, yaitu pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, media, serta aspek hukum dan regulasi. Namun demikian, implementasi kolaborasi antar aktor tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan masih menunjukkan karakteristik kolaborasi yang bersifat parsial serta belum terintegrasi secara menyeluruh. Pemerintah menjalankan peran yang

masih sangat dominan dalam mengendalikan arah kebijakan dan proses pengambilan keputusan. Pemerintah berfungsi sebagai aktor utama yang menginisiasi, mengoordinasikan, dan mengatur jalannya pembangunan, termasuk dalam penetapan kebijakan strategis dan penyelesaian konflik di lapangan. Meskipun pemerintah telah membuka ruang kolaborasi melalui berbagai forum koordinasi dan sosialisasi, pola hubungan yang terbentuk masih cenderung hierarkis, sehingga prinsip partisipatif dalam *collaborative governance* belum sepenuhnya terwujud. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi dari pendekatan *government-centered* menuju *governance-centered* masih dalam tahap transisi (Ramadhan, 2023).

Pada aspek masyarakat, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat berperan sebagai aktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pembangunan, terutama dalam isu pembebasan lahan. Namun, keterlibatan masyarakat masih bersifat reaktif dan terbatas pada tahap implementasi, bukan pada tahap perencanaan. Partisipasi yang terjadi lebih bersifat konsultatif daripada deliberatif, sehingga masyarakat belum sepenuhnya menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menyebabkan munculnya resistensi sosial yang berdampak pada dinamika pembangunan (Fadli, 2024). Ektor swasta menunjukkan peran yang kuat dalam aspek teknis dan operasional pembangunan. Keterlibatan sektor swasta melalui skema kerja sama dengan pemerintah memungkinkan percepatan pembangunan serta peningkatan efisiensi proyek. Namun, orientasi sektor swasta yang cenderung berfokus pada efisiensi dan keuntungan ekonomi belum sepenuhnya selaras dengan kepentingan sosial masyarakat. Hal ini menciptakan ketegangan antara logika ekonomi dan logika sosial dalam proses kolaborasi (Nugroho, 2022).

Penelitian ini menunjukkan bahwa peranan akademisi yang dijalankan masih terbatas pada tahap awal perencanaan, seperti dalam penyusunan studi kelayakan dan analisis dampak lingkungan. Keterlibatan akademisi belum berlanjut pada tahap implementasi maupun evaluasi, sehingga kontribusi ilmiah yang dihasilkan belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung keberlanjutan kebijakan. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara dunia akademik dan praktik kebijakan publik (Rahmi, 2023). Media dalam penelitian ini berperan sebagai aktor yang membentuk opini publik dan meningkatkan tekanan terhadap pemerintah melalui pemberitaan. Meskipun tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, media memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Peran ini menunjukkan bahwa media berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dalam kerangka *collaborative governance* (Nasution, 2022).

Aspek terakhir yaitu hukum dan regulasi menjadi fondasi utama yang mengatur interaksi antar aktor. Regulasi memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan pembangunan serta menjadi instrumen dalam menyelesaikan konflik. Namun, implementasi regulasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal konsistensi dan adaptasi terhadap kondisi sosial masyarakat. Dalam beberapa kasus, regulasi justru menjadi sumber konflik ketika tidak mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat secara adil (Maulana, 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam pembangunan Jalan Tol Sibanceh melalui model Hexa Helix telah berjalan, tetapi masih berada pada tahap awal dan belum mencapai bentuk kolaborasi yang ideal. Interaksi antar aktor masih didominasi oleh pemerintah, sementara aktor lainnya belum berperan secara seimbang dan terintegrasi. Kolaborasi yang terjadi cenderung bersifat instrumental dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan, partisipasi aktif, serta pengambilan keputusan bersama. Demikian untuk mewujudkan *collaborative governance* yang lebih efektif dalam pembangunan infrastruktur, diperlukan penguatan pada beberapa aspek, yaitu peningkatan partisipasi masyarakat secara substantif, integrasi peran akademisi dalam seluruh tahapan kebijakan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui media, serta reformasi regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial. Selain itu, pemerintah perlu bertransformasi dari aktor dominan menjadi fasilitator kolaborasi yang mampu menciptakan ruang interaksi yang setara antar seluruh aktor dalam model Hexa Helix.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. (2024). Peran media digital dalam meningkatkan transparansi kebijakan publik di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Publik Indonesia*, 9(1), 45–60.
- Darmawan, A. (2022). Problematika implementasi kebijakan publik dalam perspektif regulasi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 101–115.
- Fadli, M. (2024). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur: Studi kasus konflik pembebasan lahan. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 20(1), 77–92.
- Firmansyah, D. (2023). Peran regulasi dalam mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 210–225.
- Hidayat, R. (2023). Pemberdayaan masyarakat dalam kebijakan pembangunan berbasis partisipatif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 27(1), 88–102.
- Hidayatullah, S. (2023). Peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 145–160.
- Iskandar, D. (2022). Collaborative governance dalam pembangunan infrastruktur daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(3), 233–248.
- Kurniawan, B. (2024). Integrasi akademisi dalam proses kebijakan publik di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 55–70.
- Lestari, S. (2023). Tantangan komunikasi antara akademisi dan pembuat kebijakan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 20(2), 120–134.
- Maulana, A. (2024). Implementasi hukum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. *Jurnal Hukum Nasional*, 18(1), 33–48.
- Nasution, F. (2022). Peran media dalam pembentukan opini publik terhadap kebijakan pemerintah. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 6(2), 90–104.
- Nugroho, Y. (2022). Konflik kepentingan dalam kerja sama pemerintah dan swasta. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 10(2), 167–180.
- Prasetyo, A. (2024). Koordinasi kelembagaan dalam pembangunan infrastruktur nasional. *Jurnal Governance Indonesia*, 11(1), 25–40.
- Prasetyo, A., & Huda, M. (2023). Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam pembangunan nasional. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 112–126.
- Putra, E. (2024). Reformasi regulasi dalam mendukung collaborative governance. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 11(1), 1–15.
- Putri, N. (2024). Model partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(1), 66–80.
- Rahman, A. (2023). Transparansi dalam kerja sama pemerintah dan badan usaha. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 9(2), 134–149.
- Rahmi, N. (2023). Peran akademisi dalam pembangunan berbasis evidence-based policy. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 5(2), 77–91.
- Rahayu, S. (2022). Dominasi pemerintah dalam collaborative governance di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(2), 150–165.
- Ramadhan, F. (2023). Model collaborative governance dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Governance dan Kebijakan Publik*, 7(1), 89–104.

- Sari, D. (2021). Transformasi governance dalam kebijakan publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 1–14.
- Saputra, H. (2022). Media dan dinamika kebijakan publik di era digital. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 8(1), 55–70.
- Sumanti, R. (2024). Collaborative governance: Strategi pencegahan dan penurunan prevalensi stunting. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(1), 13–26.
- Tuthaes, L. C., Toda, H., & Lake, P. (2024). Hexa helix's collaboration in creative economy development based on local wisdom: Case study of ikat weaving MSMEs in Kupang City. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 171–185.
- Winarna, A., & Wasistiono, S. (2025). Synergy of sovereignty and society: The penta-helix model for integrated governance. *Jurnal Bina Praja*, 17(2).
- Yusuf, M. (2022). Konflik sosial dalam pembangunan infrastruktur dan resolusinya. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 28(1), 99–115.
- Yuliana, T. (2021). Fungsi kontrol sosial media dalam kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(2), 140–155.